

**PENEMPATAN SISTEM PERTAHANAN RUDAL TERMINAL HIGH  
ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

ADIS DWI MAQFIRAH

E061191115

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENEMPATAN SISTEM PERTAHANAN RUDAL TERMINAL  
HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) DAN  
DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN REGIONAL ASIA  
TIMUR

N A M A : ADIS DWI MAQFIRAH

N I M : E061191115

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 22 Mei 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,



**Agussalim, S.IP, MIRAP**  
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,



**Aswin Bahauddin, S.IP, MA**  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan  
Ketua Departemen Hubungan Internasional,



**Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021900021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

### HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENEMPATAN SISTEM PERTAHANAN RUDAL TERMINAL  
HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) DAN  
DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN REGIONAL ASIA  
TIMUR

N A M A : ADIS DWI MAQFIRAH

N I M : E061191115

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 19  
Mei 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP .....

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA .....

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si. ....

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA .....

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA .....

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adis Dwi Maqfirah

NIM : E061191115

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**PENEMPATAN SISTEM PERTAHANAN RUDAL TERMINAL HIGH  
ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Mei 2023



Adis Dwi Maqfirah

## KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan rasa syukurnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas seluruh proses dalam penyelesaian studi sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin. Penulis mampu mendapatkan ilmu yang berlimpah di bawah lingkungan akademi dan profesional yang suportif berkat kasih sayang-Nya, kuasa-Nya, dan kemuliaan-Nya. Selama empat tahun ini Penulis diperkenankan atas kebesaran-Nya untuk menjalankan studi keilmuan yang merupakan kegemaran pribadi. Penulis juga dikaruniai sejumlah individu dan/atau kelompok yang eksistensinya penting dalam ranah akademik, profesional, maupun pengembangan kualitas pribadi:

1. Orang tua Penulis, **Andi Tenry Anny** dan **Hartono Stiawan**, merupakan dua individu yang berkorban banyak demi anaknya. Apresiasi tertinggi Penulis ucapkan kepada mereka atas dukungan dan doa yang selalu ada dalam seluruh langkah yang Penulis ambil seumur hidup. *Your presence is the best thing in this entire world. I intend to give my best in making the best world for you.*
2. Kakak Penulis, **Aldi Raditya Firstanto** dan **Lisa Sukmawati**, merupakan dua individu panutan. Penulis menghormati seluruh usaha mereka dalam mendorong versi terbaik adiknya melalui seluruh bentuk dukungan yang tak hentinya diberikan. *You make my world greater than it is. I aspire to be the best for you too.*
3. Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, **Prof. H. Darwis, MA. Ph.D**, merupakan sosok yang bijaksana dan rasional. Penulis

berterima kasih atas ilmu yang diajarkan selama studi, sifat teladan rendah hatinya yang perlu menjadi panutan, dan dukungannya atas seluruh pengembangan kapabilitas mahasiswa.

4. Dosen Pembimbing I, **Agussalim, S.IP, MIRAP**, dan Dosen Pembimbing II, **Aswin Baharuddin, S.IP, MA**, merupakan dua pengajar yang memiliki andil signifikan selama masa studi Penulis. Sebuah kehormatan untuk Penulis mampu didampingi dan dibantu dalam banyak hal, termasuk bidang keilmuan dan profesionalitas, oleh dua sosok yang hangat dan progresif. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keduanya. *I owe a lot to both of you. May God bless you and enable you to empower others forever.*
5. Dosen, **Muhammad Ashry Sallatu, S.IP, M.Si**, merupakan sosok yang membentuk karakter Penulis selama studi. Tanpa eksistensinya, Penulis tidak mampu mendorong dan membangun pribadinya menjadi mahasiswa yang progresif dan gemar belajar. Penulis berterimakasih atas segala kesempatan dan ilmu yang diberikan olehnya. *I learn to be a lifelong learner from you, may God bless you forever.*
6. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diajarkan, pengaruh positif, dan lingkungan belajar yang sangat progresif: **Drs. Patrice Lumumba, MA, Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., M. Imran Hanafi, MA., M.Ec., Ishaq Rahman, S.IP., MSi., Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D.,**

**Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Burhanuddin, S.IP., M.Si., Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Dr. Adi Suryadi B, M.A., Nurjannah Abdullah, S.IP., MA, Bama Andika Putra, S.IP., M.IR., Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., MIR., Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM., dan Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.**

7. Penulis berterimakasih kepada para Profesor di Hanyang University (Seoul Campus): **Samantha Afflick-Smith-Henry, Carl Joergen Saxer, Michael William Brandon,** dan **David Andrew Tizzard.** *Four months in the Fall semester 2022 were eye-opening, enlightening, and inspiring for me. Thank you for empowering me to take a leap of faith, Professors!*
8. Teman kuliah, **Deborah, Dinna, Kezia, Maya, Nadya, Nia, Reysita,** dan **Samantha,** merupakan keluarga Penulis selama berada di Kota Makassar. Penulis mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada mereka atas seluruh bantuan dan dukungan materil maupun immateril yang diberikan. Mereka membuktikan eksistensi dan peranan keluarga non-konvensional kepada Penulis. *I don't know how I can possibly repay your kindness. God bless you.*
9. Teman kuliah, **Daffa, Geovanny, Adit, Indra, Vanissa, Nisya, Chantika, Nadin, Reza, Bima, Kia,** dan **Adil,** merupakan teman-teman yang sangat berharga untuk Penulis selama studi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka atas bantuan dan seluruh kenangan kita bersama.
10. Seluruh *Awardee* IISMA Hanyang 2022, utamanya **Aarnee, Angel, Azalea, Daffa, Fraka,** dan **Nisa,** merupakan pribadi-pribadi yang visioner dan

inspirasi. Penulis berterima kasih kepada mereka atas kebaikan hati dan motivasinya untuk selalu menjadi pribadi yang berkembang dan bermanfaat.

11. Teman kuliah, **A. Denis Soenarno, Hong Ji-won, dan Shin Dong-min**, merupakan kelompok belajar yang menjadi penyemangat dan pengisi hari-hari Penulis selama studi di Korea Selatan. *Major credit to you guys for all of our (endless) talks, which sometimes are legit fruitful and the rest is for you to recall lol. Tuesdays and Fridays never be the same without Chimex.*
12. Teman SMA dan SMP, **Abelia, Alma, Alya, Cahaya, Diko, Farah, Febrin, Geby, Mutiara, Natasya, dan Octavanissa**, merupakan individu-individu *support system* penting. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka, atas dukungan, doa, dan bantuan yang selalu diberikan. *I wish that we could maintain this great support to each other forever.*
13. Penulis menyampaikan apresiasinya yang besar kepada seluruh pengurus dan anggota Unhas MUN Community tahun 2019-2023 atas kinerjanya dalam membangun dan menjalankan organisasi, terutama **Kak Aldy, Kak Naila, Kak Icha, Kak Tiara, Rio, Lulu, Faje, Regina, Karisma, dan Nanda**. Tidak lupa juga, Penulis berterimakasih kepada mereka atas hubungan pertemanan yang sangat suportif.
14. Teman magang, **Aldy, Ami, Ariska, Aya, Bennett, Irham, Marchya, Mudy, dan Risda**, merupakan individu-individu yang membuat pengalaman magang Penulis lebih berarti. Penulis berterimakasih kepada mereka atas pertemanan yang kita jalin sejak periode magang sampai saat ini.

## ABSTRAK

**Adis Dwi Maqfirah, 2019. E061191115. "PENEMPATAN SISTEM PERTAHANAN RUDAL TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR". Pembimbing I: Agussalim, S. IP, MIRAP. Pembimbing II: Aswin Baharuddin, S. IP, MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan penempatan sistem pertahanan peluru kendali Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan dan mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Timur.

Penelitian ini menggunakan Teori Pengambilan Keputusan untuk menelisik proses pengambilan keputusan Kebijakan Luar Negeri (KLN) Korea Selatan dalam penempatan THAAD dan Teori Kompleks Keamanan Kawasan untuk menjelaskan dampak penempatan THAAD di Korea Selatan terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Analisis dilakukan pada level domestik dan kawasan untuk memeriksa implikasi pengambilan keputusan KLN Korea Selatan terhadap dinamika keamanan di kawasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan penempatan THAAD di Korea Selatan ditentukan oleh ancaman perkembangan senjata nuklir dan peluru kendali Korea Utara. Setelah pendekatan yang beragam untuk merealisasikan denuklirisasi Korea Utara gagal, Korea Selatan membangun sistem pertahanan rudal berlapis demi memastikan kesuksesan deterensi. Penempatan THAAD di Korea Selatan mendatangkan respon yang beragam dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Secara umum, respon penerimaan datang dari Jepang dan Amerika Serikat. Sedangkan Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok mengekspresikan penolakan terhadap pemasangan sistem pertahanan rudal. Meskipun mendapatkan respon yang beragam, penempatan THAAD di Korea Selatan tetap berlanjut sebagai bentuk pertahanan domestik.

**Kata Kunci:** Korea Selatan, THAAD, Sistem Pertahanan Rudal, Kebijakan Luar Negeri, Asia Timur

## ABSTRACT

**Adis Dwi Maqfirah, 2019. E061191115. “DEPLOYMENT OF THE TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) MISSILE DEFENSE SYSTEM AND ITS IMPACT ON EAST ASIA REGIONAL SECURITY”. Advisor I: Agussalim, S. IP, MIRAP. Advisor II: Aswin Baharuddin, S. IP, MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.**

This research aims to analyze the decision-making process of the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) missile defense system deployment in South Korea and evaluate its impact on security stability in the East Asia region.

This research applies the “Decision Making Theory” to examine the decision-making process of South Korean Foreign Policy (FP) in the deployment of THAAD and “Regional Security Complex Theory” to explain its impact on the security stability of the East Asia region. The research uses domestic and regional level of analysis to see the overall impact of South Korea's FP decision-making on regional security dynamics.

The results of this research indicate that the decision to deploy THAAD in South Korea is ultimately determined by the threat of North Korean nuclear weapons and missile developments. After various efforts to achieve North Korea's denuclearization failed, South Korea built a layered missile defense system to ensure its deterrence success. THAAD deployment in South Korea received mixed responses from its surrounding in the East Asian region. In general, the acceptance response came from Japan and the United States. Meanwhile, North Korea and the People's Republic of China rejected the installation of a missile defense system. Despite receiving mixed responses, the deployment of THAAD in South Korea continues as a form of national defense.

**Keywords:** South Korea, THAAD, Missile Defense System, Foreign Policy, East Asia

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                   | i    |
| <b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....                      | ii   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....                      | iii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                       | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | viii |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | ix   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | x    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | xii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | xiii |
| <b>DAFTAR BAGAN</b> .....   | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                    | 1    |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....                            | 1    |
| <b>B. Batasan dan Rumusan Masalah</b> .....                       | 9    |
| <b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....                     | 11   |
| <b>D. Kerangka Konseptual</b> .....                               | 12   |
| 1. <b>Teori Kompleks Keamanan Kawasan</b> .....                   | 12   |
| 2. <b>Teori Pengambilan Keputusan</b> .....                       | 14   |
| <b>E. Metode Penelitian</b> .....                                 | 17   |
| 1. <b>Tipe Penelitian</b> .....                                   | 17   |
| 2. <b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....                           | 17   |
| 3. <b>Jenis Data</b> .....  | 17   |
| 4. <b>Teknik Analisis Data</b> .....                              | 18   |
| 5. <b>Metode Penulisan</b> .....                                  | 18   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                              | 19   |
| <b>A. Teori Kompleks Keamanan Kawasan</b> .....                   | 19   |
| <b>B. Teori Pengambilan Keputusan</b> .....                       | 29   |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....                                | 39   |
| <b>A. Sistem Pertahanan Peluru Kendali di Korea Selatan</b> ..... | 39   |
| <b>B. Keamanan Regional Asia Timur</b> .....                      | 48   |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....                                    | 55   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Proses Pengambilan Keputusan Penempatan Sistem Pertahanan Rudal THAAD di Korea Selatan .....</b>                           | <b>55</b> |
| 1. Bidang Kompetensi ( <i>Spheres of Competence</i> ).....   | 58        |
| 2. Komunikasi dan Informasi ( <i>Communication and Information</i> ).....  | 66        |
| 3. Motivasi ( <i>Motivation</i> ) .....  | 71        |
| <b>B. Dampak Penempatan Sistem Pertahanan Rudal THAAD di Korea Selatan terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Timur .....</b> | <b>79</b> |
| 1. Republik Rakyat Tiongkok .....  | 80        |
| 2. Jepang .....  | 83        |
| 3. Korea Utara .....   | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>90</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 90        |
| B. Saran .....   | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>93</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| <b>Gambar 3. 1 Skema Sistem Triad – Kill Chain</b> .....   | 44 |
| <b>Gambar 3. 2 Skema Sistem Triad – KAMD</b> .....   | 45 |
| <b>Gambar 3. 3 Skema Sistem Triad – KMPR</b> .....   | 46 |
| <b>Gambar 3. 4 Skema Operasional THAAD</b> .....   | 47 |
| <br>   |    |
| <b>Gambar 4. 1 Pendapat Masyarakat Korea Selatan terhadap Penempatan THAAD</b> 70                            |    |
| <b>Gambar 4. 2 Perbandingan Jumlah Ekspor 6 Komoditas Terbaik Korea Selatan ke RRT (2017 dan 2019)</b> ..... | 74 |

## DAFTAR TABEL

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabel 2. 1 Tipe dan Contoh Kompleks Keamanan Kawasan .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>Tabel 3. 1 Peluncuran Peluru Kendali Korea Utara (1984-2022) .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>Tabel 3. 2 Percobaan Senjata Nuklir Korea Utara .....</b>  | <b>52</b> |
| <b>Tabel 4. 1 Pola PKKLN Korea Selatan dalam Pemasangan THAAD .....</b>   | <b>66</b> |
| <b>Tabel 4. 2 Peluncuran Uji Coba Peluru Kendali Korea Utara (2019-2020) .....</b>  | <b>76</b> |
| <b>Tabel 4. 3 Peluncuran Uji Coba Peluru Kendali Korea Selatan (Januari – Februari 2022) .....</b>                              | <b>77</b> |
| <b>Tabel 4. 4 Respon Negara-Negara di Kompleks Keamanan Kawasan Asia Timur terhadap Pemasangan THAAD di Korea Selatan .....</b> | <b>86</b> |

## DAFTAR BAGAN

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual .....</b>                   | <b>12</b> |
| <b>Bagan 2. 1 Siklus Perubahan Kebijakan Luar Negeri.....</b> | <b>37</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Republik Korea atau Korea Selatan adalah negara berdaulat yang terletak di selatan Semenanjung Korea, berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara di sebelah utara. Semenanjung Korea tidak terbagi secara geografis sejak ratusan tahun lalu, partisi terjadi sepenuhnya karena konflik politik yang berujung pada Perang Korea. Kedua negara tersebut secara resmi masih dalam status perang, dimulai pada Juni 1950 saat Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il-sung bertekad untuk mempersatukan Korea melalui invasi menuju ke bagian selatan semenanjung. Syngman Rhee, pemimpin yang ditunjuk oleh AS di selatan, juga memiliki keinginan yang sama, namun menolak untuk tunduk pada ideologi yang dibawa oleh Korea Utara.

Sebelumnya, Jepang memenangkan perang melawan Dinasti Qing pada akhir masa monarki Dinasti Joseon di Semenanjung Korea. Kekaisaran Korea terbentuk pasca Dinasti Joseon dan secara resmi menjadi protektorat Jepang. Pembunuhan Ketua Dewan Penasihat Kaisar, Ito Hirobumi, oleh aktivis kemerdekaan Korea, Ahn Jung-geun, merupakan salah satu pemicu aneksasi Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910. Pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang meninggalkan semenanjung dan menyebabkan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet untuk melakukan manuver.

Kesepakatan gencatan senjata ditandatangani pada 27 Juli 1953 dan belum berakhirnya perang di Semenanjung Korea membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara masing-masing, secara sadar maupun tidak sadar, dalam keadaan waspada sampai saat ini. Lebih dari enam abad perang terjadi, Korea Selatan dan Korea Utara tidak mampu mengabaikan fakta bahwa mereka mengklaim kedaulatan yang penuh pada wilayah Semenanjung Korea secara utuh. Dengan klaim ini, otomatis kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatis karena keduanya tidak mengakui eksistensi satu sama lain. Presiden Park Geun-Hye saat kampanye kepresidenannya juga menyebutkan ketiadaan basis kepercayaan dalam hubungan antar-Korea sebagai salah satu ancaman serius kestabilan keamanan regional Asia Timur (Snyder, 2018). Bentuk pengaruhnya seperti masih diberlakukannya wajib militer untuk seluruh warga negara laki-laki dewasa dan institusionalisasi reunifikasi Semenanjung Korea lewat adanya kementerian atau badan setara yang fokus untuk pendekatan reunifikasi di kedua negara.

Perbedaan yang nyata antara kedua negara di Semenanjung Korea adalah pendekatan dalam pembangunan kembali atau *redevelopment* pasca Perang Korea. French (2014) menulis bahwa ideologi *juche* yang diciptakan oleh Kim Il-sung, memiliki arti *self-reliance* atau kemandirian, merupakan basis pembangunan Korea Utara hingga saat ini. Melalui *juche*, Korea Utara menerapkan *military-first policy* atau Kebijakan Keutamaan Militer untuk memastikan kemerdekaan politik yang merupakan kondisi untuk mencapai kemandirian ekonomi. Namun sayangnya ideologi tersebut lama-kelamaan

menjadi baju pengekan atau *straitjacket* yang sangat paradoks dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi. Meskipun menghadapi kegagalan dalam memenuhi kemandirian ekonomi yang diharapkan, menurut Park (2012) Korea Utara tetap memprioritaskan *military-first policy*. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, Pyongyang menggunakan taktik provokasi yang beragam – dari ancaman konvensional maupun melalui program-program nuklir dan misil yang menimbulkan gejolak keamanan regional maupun internasional. Korea Utara pernah melakukan percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan, melalui operasi komando seperti Penyerangan Istana Kepresidenan atau *cheongwadae* tahun 1968 dan Pengeboman Rangoon tahun 1983 (Maass, 2019). Sejumlah provokasi juga ditujukan kepada militer Korea Selatan pada tahun 2010, di antaranya serangan peledakan ROKS Cheonan, kapal perang milik Angkatan Laut Korea Selatan, dan penembakan Pulau Yeonpyeong di Incheon menggunakan peluru artileri.

Tercatat bahwa investasi Korea Utara tahun 2019 pada aspek keamanan negara khususnya besar menurut data World Military Expenditures and Arms Transfers (WMEAT) dengan jumlah 26.4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (US Department of State, 2021). Percobaan misil maupun pengayaan nuklir semakin gencar dan berani dilakukan oleh Korea Utara, terutama pasca ditinggalkannya Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) pada tahun 2003. Korea Utara terus melakukan penelitian dan pembangunan bom nuklir menggunakan bahan dasar uranium atau plutonium yang memadai untuk dijadikan senjata dan mendemonstrasikannya melalui tes senjata nuklir

yang telah dilakukan sebanyak enam kali. Kepercayaan diri Pyongyang semakin meningkat terutama pada tahun 2016 tes sukses dilakukan dua kali dalam kurun waktu delapan bulan. Lee & Ryu (2017) menyatakan bahwa kesuksesannya terbukti dari kurangnya antisipasi komunitas internasional terkait lokasi tes tersebut karena minimnya tanda-tanda pembangunan dan persiapan, faktor lainnya adalah Korea Utara telah mampu untuk memproduksi masif bahan dasar nuklir.

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau Weapon of Mass Destruction (WMD) oleh Korea Utara jika gagal dibendung bisa menyebabkan perlombaan senjata dan reaksi pada aspek perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Timur (Bae & Moon, 2005). Status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir meningkatkan kerawanan konflik langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara di sekitarnya. Berbagai macam hukuman telah dijatuhkan kepada Korea Utara untuk mencegah pembangunan nuklir lanjutan, termasuk lima Resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun sanksi unilateral masing-masing dari AS, Jepang, dan Korea Selatan (Lee & Ryu, 2017). Korea Utara bersikeras bahwa tujuan kepemilikan senjata nuklir adalah untuk mencegah serangan AS; tetapi karena Korea Selatan berada dalam payung nuklir AS, sehingga Korea Selatan menjadi target utama Korea Utara untuk mendemonstrasikan kredibilitas ancaman nuklir terdekat (Cohen & Kim, 2017).

Sebagai respon terhadap ancaman senjata nuklir maupun peluru kendali balistik dari Korea Utara, Korea Selatan secara aktif melakukan usaha-usaha pertahanan domestik. Pada mulanya di tahun 1980an Korea Selatan hanya

menerima pengetahuan mengenai Pertahanan Rudal Teater atau Theatre Missile Defense (TMD) dari AS, hampir dilakukan pembelian pada tahun 1993 namun masih ada keraguan internal untuk pengadaan sistem tersebut. Pasukan Amerika Serikat Korea atau United States Forces Korea (USFK) secara tidak langsung memulai pembangunan sistem pertahanan dengan pembelian PATRIOT Advanced Capability 2 (PAC-2) pada tahun 1994 untuk tujuan keamanan pasukan militer, bukan Korea Selatan. Setelah pembahasan ini muncul lagi dalam beberapa forum bilateral Seoul – Washington pada akhir 1990an disebabkan oleh peningkatan kekuatan Pyongyang, Seoul mulai memperoleh komponen sistem Korea Air and Missile Defence (KAMD) (Fearey & Sankaran, 2017). Korea Selatan juga membeli PAC-3 pada tahun 2014 (Defense Security Cooperation Agency, 2014) dalam usaha melengkapi sistem pertahanan.

Pada 8 Juli 2016, Korea Selatan dan AS menyetujui pemasangan sistem Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan untuk merespon lebih lanjut perkembangan peluru kendali di Korea Utara (USFK, 2016). Hal ini menunjukkan sikap Seoul yang waspada akan pengembangan maupun diversifikasi teknologi persenjataan Pyongyang. Mengutip East Asian Strategic Review 2015 oleh The National Institutes for Defense Studies (2015) Seoul melaporkan adanya pembangunan kapal selam yang mampu membawa peluru kendali balistik oleh Pyongyang. THAAD diharapkan mampu menangkal peluru kendali dengan cakupan 40-150 km dan menjadi lapisan pertahanan tambahan Korea Selatan di samping PAC-2, PAC-3, dan L-SAM yang masih dalam proses pengembangan (Arirang News, 2016).

Korea Selatan memilih untuk memasang sistem THAAD setelah sejumlah pertimbangan pertahanan yang sejalan dengan perkembangan masif teknologi peluru kendali Korea Utara terutama yang berjarak pendek sampai menengah. Menurut Lyon (2016), THAAD cukup mampu untuk mencegat misil berjarak pendek karena dilengkapi dengan radar AN/TPY-2 yang bisa memberikan prediksi dan informasi akurat. Menurut Easley (2016), THAAD merupakan pilihan pertahanan terbaik Korea Selatan untuk meminimalisir probabilitas kegagalan dan meningkatkan probabilitas kesuksesan, dalam memitigasi ancaman dari Korea Utara terutama penangkalan peluru kendali dan senjata nuklir. Pada saat itu, belum ada pilihan selain THAAD yang mampu mengulur waktu untuk mencegat peluru kendali dari Korea Utara dan menghancurkannya menggunakan hulu ledak sebelum sampai di daratan targetnya. Tidak lama setelah pengumuman kesepakatan AS-Korea Selatan terkait THAAD, Arirang News (2016) melaporkan bahwa Korea Utara melakukan percobaan penembakan tiga misil Rodong dari Hwangju, Provinsi Hwanghae Utara ke Laut Jepang.

Usaha pertahanan yang baru dikembangkan oleh Korea Selatan ternyata mendapatkan respon negatif dari salah satu negara di Asia Timur, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Radar AN/TPY-2 dikhawatirkan mampu menguntungkan AS melalui peringatan dini dan pelacakan Peluru Kendali Balistik Antarbenua atau Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) milik RRT (Panda, 2016a). Qiu Guohong, Duta Besar RRT untuk Korea Selatan, menyampaikan kepada media bahwa pemasangan THAAD bisa merusak

keseimbangan strategis di wilayah dan membentuk siklus konfrontasi yang akhirnya tereskalasi menjadi ketegangan (The Chosunilbo, 2016). Pernyataan tersebut disampaikan selang beberapa hari setelah kesepakatan THAAD dipublikasi dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan kedua negara dalam beberapa tahun ke depan.

Watts (2017) menjabarkan sejumlah alasan penolakan pemasangan THAAD di Semenanjung Korea yang sering disebutkan dalam media RRT. Pertama, THAAD melebihi kebutuhan keamanan Korea Selatan dan akan memunculkan perlombaan senjata di Semenanjung Korea. Kedua, radar THAAD akan mengancam sistem penangkalan nuklir RRT. Juga, pengembangan Sistem Pertahanan Rudal Balistik atau Ballistic Missile Defense (BMD) di Korea Selatan akan memperkuat aliansi AS di Asia Timur. Presiden RRT, Xi Jinping, pada tahun 2014 juga pernah menyampaikan anjurannya kepada Presiden Park agar menolak pemasangan sistem dengan alasan yang serupa. Para petinggi Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri RRT memberikan sinyal penolakan kepada Korea Selatan dalam beberapa forum sebelumnya. Dapat diperhatikan bahwa RRT berada dalam posisi *security dilemma* atas pengembangan THAAD di Korea Selatan akibat dari ancaman teknologi nuklir Korea Utara.

Selain alasan-alasan yang tertera di atas, penolakan RRT yang berujung pada ancaman pemutusan jalinan diplomatik. Respon ini merupakan tindakan tidak terduga disebabkan hubungan kedua negara yang sedang dalam keadaan terbaik. Selama sejarah tercatat, Presiden RRT selalu melakukan kunjungan

resmi ke Korea Utara terlebih dahulu sebelum ke Korea Selatan. Namun, Presiden Xi Jinping setelah menjabat pada tahun 2013 mengunjungi Korea Selatan terlebih dahulu di awal 2014 baru menyambangi Korea Utara setelahnya. RRT di masa-masa awal kepemimpinan Presiden Xi cukup menjaga jarak atas hubungannya dengan Korea Utara dan sempat menyebutkan bahwa hubungan RRT – Korea Selatan adalah yang terbaik dalam sejarah berkat pendekatan personal Park (Jung & Piao, 2022; Tiezzi, 2015).

Korea Selatan bersikeras bahwa pemasangan THAAD merupakan bentuk pengembangan pertahanan berlapis untuk menangkal dan memitigasi adanya serangan dari Korea Utara tanpa ada tujuan ofensif, mengingat sistem juga hanya memiliki kapabilitas defensif. Radar AN/TPY-2 telah terbukti tidak mampu mencakup Korea Utara apalagi wilayah daratan RRT (Fearey & Sankaran, 2017). Kapabilitas THAAD akan maksimal saat diaktifkan bersamaan dengan sistem BMD lain sehingga meningkatkan akurasi penangkalan peluru kendali (Watts, 2017). Klaim penolakan yang disampaikan oleh RRT kurang relevan dengan usaha pertahanan Korea Selatan jika sampai mempertaruhkan hubungan diplomatik yang telah dibangun sejak tahun 1992. *Security dilemma* yang muncul disebabkan oleh asumsi kemungkinan THAAD bisa menjadi sistem ofensif terhadap kedaulatan RRT. Sekaligus adanya penemuan bahwa sebelum kesepakatan dengan Seoul, Washington telah memasang THAAD di Guam dan dua radar AN/TPY-2 di Jepang (Lyon, 2016), membuktikan bahwa pengembangan BMD telah terjadi di Asia Pasifik sebelumnya dan RRT tidak pernah merespon secara khusus hal tersebut.

Merespon polemik bilateral, normalisasi hubungan RRT – Korea Selatan secara berangsur-angsur dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in. RRT merupakan salah satu partner dagang Korea Selatan yang terbesar dan arus informasi maupun interaksi antarnegara sangat tinggi, tidak ada insentif yang didapat dengan memperpanjang konflik. Gejolak politik domestik Korea Selatan juga mempengaruhi pengambilan keputusan, dapat diamati dari janji kampanye Presiden Moon Jae-in untuk normalisasi hubungan Beijing – Seoul pada administrasinya. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, memberikan pernyataan terkait ketentuan yang disepakati untuk memperbaiki hubungan RRT – Korea Selatan. Diantaranya adalah: (1) tidak memiliki intensi untuk bergabung dengan sistem regional BMD AS yang bertujuan melawan ekspansi kapabilitas militer RRT, (2) tidak akan menerima tambahan baterai THAAD, dan (3) tidak akan menyetujui aliansi militer trilateral dengan AS dan Jepang (Choe, 2017).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus dalam analisis proses pengambilan keputusan pemasangan THAAD di Korea Selatan dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan Kawasan Asia Timur. Penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan Korea Selatan dalam kebijakan pemasangan THAAD, maka rentang waktu pembahasan adalah periode pasca kesepakatan penempatan THAAD di bawah masa kepresidenan Park Geun-hye (2016-2017) dan Moon Jae-in (2017-2022). Penulis akan menggunakan Teori Pengambilan Keputusan, sehingga penting untuk menelisik peranan pengambil keputusan dan

konsekuensinya pada dinamika aksi – reaksi dalam aspek stabilitas keamanan kawasan.

Sejalan dengan pendefinisian Buzan dan Waever (2003) mengenai Kompleks Keamanan Kawasan, Kawasan Asia Timur dalam konteks penelitian ini akan dibatasi pada lima negara yang mensekritisasi pemasangan THAAD, yaitu: Korea Selatan, Korea Utara, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Dominasi AS sebagai adidaya dan aktor ‘luar’ di dalam wilayah membuat relevansinya masih signifikan untuk diperhitungkan sebagai peserta kompleks ini. Keempat negara lainnya adalah para aktor ‘dalam’ wilayah yang memiliki relasi *amity – enmity* khusus antaranya, yang mempengaruhi dinamika hubungan terutama dalam diskursus keamanan. Menggunakan kerangka klasifikasi Kompleks Keamanan Kawasan oleh Buzan dan Waever juga, Asia Timur termasuk dalam Kompleks Kekuatan Dunia atau *Great Power Regional Security Complex* karena di dalamnya terdapat lebih dari satu kekuatan dunia dan satu adidaya. Menurut pemetaan kekuatan negara di dunia, Jepang dan RRT adalah kekuatan besar dunia dan AS adalah adidaya (Buzan, 2005).

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang penulis tentukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan?
2. Bagaimana dampak penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan terhadap stabilitas keamanan Kawasan Asia Timur?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

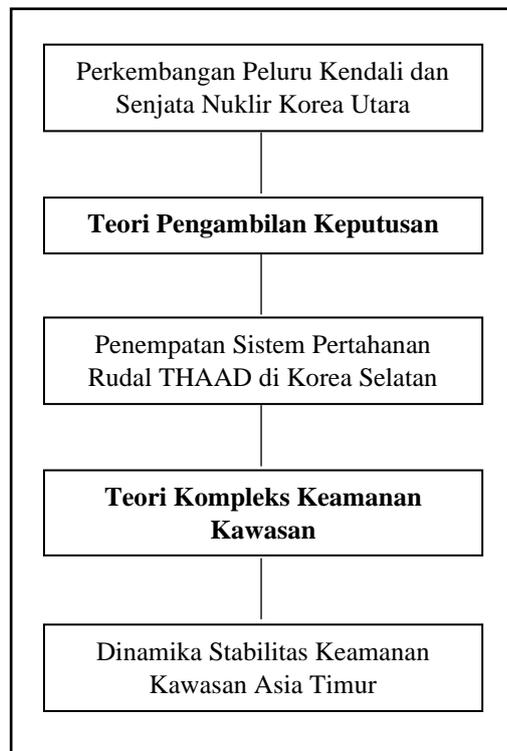
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisa proses pengambilan keputusan penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan
2. Untuk mengevaluasi dampak penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan terhadap stabilitas keamanan Kawasan Asia Timur

Sejalan dengan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat:

1. Sebagai bentuk kontribusi terhadap ilmu hubungan internasional, terutama pada studi kebijakan luar negeri, studi keamanan, dan studi kawasan Asia Timur
2. Sebagai bentuk referensi riset lanjutan maupun pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri Korea Selatan, sistem pertahanan peluru kendali THAAD, denuklirisasi Korea Utara, dan kawasan Asia Timur

#### D. Kerangka Konseptual



**Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual**

##### 1. Teori Kompleks Keamanan Kawasan

Melalui buku yang berjudul “*People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*”, Buzan (1983) menjabarkan pentingnya memiliki alat analisis keamanan yang tidak hanya berfokus pada level global dan/atau level negara namun mampu juga menjelaskan fenomena keamanan melalui pendekatan sifat dasar negara-negara dalam sebuah kawasan. Implikasi keamanan dari struktur anarki global tidak berdampak seragam di seluruh dunia, namun pola-pola kompleks dari persahabatan dan permusuhan atau *amity and enmity* yang terbentuk dari kondisi sejarah antarnegara dalam kawasan lebih berpengaruh. Sehingga lahirlah level analisis – kompleks keamanan atau *security complex*, yang

didefinisikan sebagai sebuah kelompok negara-negara yang urusan keamanan primernya bertautan dengan rapat akibatnya keamanan nasional mereka tidak mampu dipandang terpisah dengan satu sama lain.

Negara-negara di dalam *security complex* berbagi kesamaan yang mempersatukan, di antaranya seperti geografi, politik, strategi, sejarah, ekonomi, atau budaya dan negara-negara di luar sistem mungkin juga memiliki andil di dalamnya. Selain itu, faktor pemersatu yang sering muncul adalah sengketa antarnegara yang menunjukkan ketidakamanan atau *insecurity* secara kolektif. Buzan (1984) mengelaborasi bahwa walaupun *insecurity* dominan dialami oleh individu, keterbatasan kekuatan menghambat mereka dalam mengungkapkan ekspresi terkuat yang dimiliki. Pada skala yang lebih luas, sejumlah organisasi termasuk negara memiliki cukup sumber daya untuk memanifestasikan *insecurity*. Rasa tidak aman lebih cenderung mudah tersebar melalui proksimitas geografi, sehingga dalam sebuah kawasan *insecurity* mampu menjadi alat pemersatu.

Buzan & Waever (2003) mendeskripsikan lebih lanjut bahwa pembentukan Kompleks Keamanan Kawasan merupakan hasil dari proses saling pengaruh, antara struktur anarki dan konsekuensi *balance of power* yang diakibatkan dengan tekanan proksimitas geografi. Interdependensi keamanan otomatis lebih intens antarnegara di dalam sistem dibandingkan dengan negara di luar sistem, akibatnya kedekatan jarak terbukti ampuh untuk penyebaran ancaman keamanan. Kemampuan menganalisis dinamika keamanan pada level kawasan memberikan ruang penjabaran dan

pendekatan faktor-faktor lokal. Kompleks Keamanan Kawasan berbasis pada pendekatan historis dan memiliki relasi yang lebih dekat pada realita empiris para pembuat kebijakan (Buzan, 1983).

Teori Kompleks Keamanan Kawasan menjelaskan secara spesifik empat level analisis dan korelasinya satu sama lain (Buzan, 2003):

- 1) Negara-negara dalam sistem secara domestik (stabilitas tatanan domestik dan kerentanan spesifik sebuah negara mampu mendefinisikan kecemasan keamanan yang dimiliki)
- 2) Hubungan antar negara (yang membentuk kawasan)
- 3) Interaksi kawasan dengan kawasan lain yang berdekatan (walaupun hal ini relatif terbatas, mengingat kompleks menitikberatkan pada interaksi internal, namun mungkin terjadi saat ada perubahan besar dalam pola keamanan)
- 4) Peranan kekuatan global dalam kawasan (hubungan antara struktur keamanan global dan kawasan)

## **2. Teori Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan atau *decision-making* adalah proses yang menghasilkan pemilihan dari sejumlah proyek alternatif yang problematis dan terdefinisi secara sosial dari sebuah proyek yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan masa depan tertentu yang digambarkan oleh para pembuat keputusan (Bruck, Sapin & Snyder, 2002). Pengambilan keputusan nantinya akan menyebabkan rangkaian tindakan yang sejalan dengan

proyek. Peristiwa yang memunculkan keputusan adalah ketidakpastian atau *uncertainty*. Pengambilan kebijakan yang terorganisir terdiri atas rangkaian aktivitas, sehingga untuk tujuan analisis umumnya dipisahkan sebuah kejadian tertentu yang memudahkan pengamat untuk menyortir relevansi bukti-bukti. Beberapa pilihan pastinya dibuat dalam proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir akan mengantarkan para pembuat kebijakan untuk memilih rangkaian tindakan yang diimplementasikan, kemudian mereka secara penuh bertanggungjawab atas keputusan tersebut. Model pengambilan keputusan ini biasanya disebut sebagai “kotak hitam”, dimana masyarakat tidak mampu melihat ke dalam kotak dan negara atau para pemimpin berfungsi identik satu sama lain. Informasi mengenai permasalahan yang ada, termasuk aksi-reaksi dan prediksi kesuksesan, akan dimasukkan ke dalam kotak. Di dalamnya kalkulasi dasar berbasis utilitas ekonomi dilakukan, pilihan aksi mana yang mampu memenuhi kepentingan nasional dan meminimalisir biaya. Setelah kebijakan keluar, lingkungan akan bereaksi terhadap keputusan tersebut dan siklus akan berputar seperti sebelumnya lagi (Neack, 2008).

Morin & Paquin (2018) membahas Kebijakan Luar Negeri (KLN) secara luas, dengan definisi: rangkaian tindakan atau peraturan yang mengendalikan tindakan dari sebuah otoritas politik yang independen ditugaskan dalam lingkup internasional. Menurut definisi tersebut KLN eksklusif hanya bisa dilakukan oleh negara berdaulat dan prosesnya mempertimbangkan juga aksi, reaksi, bahkan sifat pasif yang mungkin

terjadi antar aktor dalam hubungan. Salah satu perbedaan KLN dari kebijakan publik lainnya adalah otoritas politik yang mengadopsi dan mengimplementasi KLN memiliki minim kontrol terhadap hasilnya karena hal tersebut tergantung pada variabel-variabel yang tidak dalam kedaulatannya. KLN tidak permanen, sehingga dimungkinkan adanya perubahan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan pengambil keputusan. Perubahan KLN menurut Jerel Rosati merupakan proses siklus peralihan antara stabilitas dan transisi (Gustavsson, 1999).

Teori Pengambilan Keputusan yang dikembangkan oleh Bruck, Sapin & Snyder (2002) memiliki asumsi dasar bahwa untuk mengkaji seorang aktor pembuat kebijakan harus termasuk elemen-elemen nilai yang dianut, pengalaman sebelumnya, dan pola perilakunya. Hal ini terkait dengan konsep kompetensi yang mereka paparkan. Kompetensi artinya adalah totalitas yang relevan dan diperlukan dalam aktivitas yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk pemenuhan objektif organisasi. Dalam konteks KLN, dibentuk unit organisasi yang dibentuk dan berfungsi untuk memenuhi objektif sehingga memiliki kapabilitas dalam memilih tindakan yang dirasa perlu. Objektif KLN sangat beragam, bisa berbasis kepentingan – politik, ekonomi, militer, dsb. – bisa juga berbasis urgensi atau tenggat waktu sebuah keputusan harus diimplementasikan untuk memastikan pemenuhan objektif.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada observasi yang dilakukan oleh penulis atas pernyataan atau tindakan dari subjek penelitian melalui perbandingan deskriptif fenomena sosial (Mligo, 2016). Penulis akan menelisik proses pengambilan keputusan dalam penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan dan mengkaji dan menarik hasil penelitian yang komprehensif terkait dampaknya pada aspek keamanan kawasan Asia Timur menggunakan tipe penelitian tersebut

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut George (2008), studi kepustakaan adalah proses mengidentifikasi dan menemukan sumber-sumber yang memberikan informasi faktual atau opini personal atau ahli terhadap pertanyaan riset. Menggunakan teknik pengumpulan data tersebut, penulis akan mengumpulkan bahan literatur, menyortir sesuai dengan relevansi, dan menelisik data yang diperoleh untuk diaplikasikan pada penelitian. Penulis akan menggunakan data yang tersedia pada basis data kepustakaan dan media daring.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk

tujuan lain sebelumnya (Sindin, 2017). Data yang dimaksud yakni buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dokumen resmi badan pemerintah, dan laporan-laporan yang relevan. Data yang faktual akan dimanfaatkan untuk analisis dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik tersebut memfasilitasi penelitian sebuah masalah dengan lebih dalam dan detail. Penggunaan pendekatan yang tidak terbatas oleh analisa-analisa sebelumnya, hasilnya akan bercirikan pembahasan yang tajam, terbuka, dan detail (Patton, 2002). Teknik tersebut berfokus pada kualitas, dengan proses pengumpulan data, pengkajian teori dan penjabaran penemuan untuk mendapatkan argumen kesimpulan.

#### **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode tersebut akan menjelaskan gambaran umum fenomena terlebih dahulu sebelum penjabaran masing-masing rumusan masalah, akhirnya disimpulkan sesuai dengan data dan fakta yang dikaji.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Kompleks Keamanan Kawasan

*Regional Security Complex Theory* atau Teori Kompleks Keamanan Kawasan adalah sebuah teori yang menggunakan pendekatan materialis dan konstruktivis untuk menjelaskan dinamika dan pola keamanan kawasan dengan karakteristik persahabatan dan permusuhan (*amity and enmity*). Teori tersebut dijelaskan oleh Barry Buzan pertama kali pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Dalam sejumlah literatur lanjutannya, Buzan berfokus pada pengaplikasian teori dalam kasus-kasus sekuritisasi kawasan dan perluasan definisi sekaligus cakupan.

Kompleks Keamanan Kawasan mulanya diartikan oleh Buzan (1983) sebagai sebuah kelompok negara-negara yang urusan keamanan primernya bertautan dengan rapat, yang akibatnya keamanan nasional mereka tidak mampu dipandang terpisah dengan satu sama lain. Untuk memperluas cakupan objek penelitian, tidak hanya pada sentralitas peran negara dan isu keamanan konvensional, pada buku yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* dijelaskan bahwa Kompleks Keamanan Kawasan merupakan satu set unit yang proses utama sekuritisasi, desekuritisasi, atau keduanya sangat terikat sehingga permasalahan keamanannya tidak mampu dianalisa atau diselesaikan terpisah satu sama lain (Buzan, Waever, and De Wilde, 1998).

Sebelumnya, analisis keamanan umumnya hanya ditelisik pada tingkatan global atau negara tanpa menjelaskan bagaimana dinamika keamanan terjadi di tingkatan antara keduanya yaitu kawasan. Buzan (1983) mengkritik fokus analisis polarisasi dan bentuk struktur internasional yang tidak mampu menjelaskan pengaruh keduanya terhadap urusan keamanan, pendekatan yang sebelumnya dilakukan hanya satu dimensi dan ahistoris. Padahal, penyebab-penyebab global akan memicu dampak yang sangat berbeda di setiap kawasan dan penting untuk memahami dinamika kawasan. Normalnya pola konflik berasal dari faktor-faktor lokal kawasan dan kekuatan eksternal umumnya tidak mampu mendefinisikan, mendesekurititasi, atau mengatur ulang kawasan (Buzan and Waever, 2003). Kemajuan ekonomi, pembangunan nasional, perbedaan kultur, dan dinamika rezim masing-masing negara adalah beberapa faktor di antaranya yang tidak mungkin untuk disamaratakan prosesnya maupun dampaknya terhadap tatanan keamanan internasional. Keamanan internasional bisa diartikan sebagai sebuah aspirasi, bukan realita, dan urusan relasional yang umumnya mencerminkan bagaimana kolektivitas manusia bertaut satu sama lain dalam ancaman dan kerentanan (Buzan, Waever, and De Wilde, 1998; Buzan and Waever, 2003).

Buzan (1983) menyebutkan bahwa sebelumnya para ahli belum mampu untuk menarik kesimpulan yang jelas mengenai implikasi keamanan di tingkatan analisis yang berbeda. Pertanyaan yang menurutnya belum terjawab adalah seberapa besar resiko keamanan yang mampu disebabkan oleh bentuk hubungan internasional tertentu. Mereka menggeneralisir kondisi keamanan dengan faktor

tunggal *distribution of power* atau distribusi kekuatan dan menerapkan anggapan kebenaran faktor tersebut dalam seluruh periode lini masa sejarah. Karena urusan keamanan relasional, akan sulit untuk memahami keamanan nasional dari negara apapun tanpa berusaha untuk mengerti pola interdependensi keamanan dimana negara tersebut termasuk. Pola spesifik *amity and enmity* biasanya muncul dari permasalahan lokal, seperti sengketa perbatasan dan penyelarasan ideologi, yang tidak bisa diprediksi hanya oleh *distribution of power* (Buzan, 1986). Buzan and Waever (2003) menambahkan bahwa polanya mampu dipahami juga dengan memulai analisis dari tingkatan kawasan dan selanjutnya diperluas, menyertakan aktor global di satu sisi dan faktor domestik di sisi lainnya.

Ketertarikan terhadap studi regional juga menurun di kalangan para ahli dikarenakan Perang Dingin, sehingga untuk lebih dari 50 tahun dominasi sistem global membuat penjelasan mengenai sistem regional tertutupi (Lake, 1997). Besarnya peranan dan pengaruh rivalitas dua sisi yang berseteru pada tatanan keamanan dunia selama Perang Dunia II dan Perang Dingin membuat kemajuan studi regional stagnan. Komponen rivalitas kedua pihak pada saat itu lebih banyak diteliti, seperti latar belakang ideologi dan perkembangan kemajuan senjata modern. Belum ditemukan urgensi untuk melakukan riset lanjutan mengenai kawasan yang tidak mampu menjelaskan tren polaritas secara global dan peranannya juga tidak signifikan dalam kedua perang tersebut.

Banyak diduga alasan di balik fenomena dunia semakin berkarakter regionalis, di antaranya adalah runtuhnya bipolaritas yang sekaligus menghapus

kekuatan pengendali utama di level global. Para adidaya yang tersisa tidak tertarik lagi dengan rivalitas ideologi dan memunculkan tendensi menghindar dari interaksi politik yang luas kecuali kepentingan mereka secara langsung dan betul-betul terdampak di dalamnya (Buzan, Waever, and De Wilde, 1998). Penyaluran senjata modern ke Dunia Ketiga juga membawa signifikansi militer antara kekuatan besar dan kecil di dunia. Difusi kekuatan dalam sistem kontemporer meningkatkan pentingnya aktor-aktor di bawah hierarki kekuatan dalam menjalankan sistem secara keseluruhan (Buzan, 1983). Penting untuk diperhatikan bahwa kekuatan di Barat meraih kontrolnya terlebih dahulu secara global karena mereka sebelumnya memiliki sekurang-kurangnya tiga aset yang tidak dimiliki oleh aktor lainnya dalam sistem, yaitu: bentuk politik negara bangsa, kekuatan pengetahuan dan produksi dari revolusi industri dan ilmiah, dan kapasitas efektivitas persenjataan modern (Buzan, 2000). Saat aset tersebut telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga partisipasi dan kontrol dalam tatanan keamanan internasional bisa dipegang oleh siapapun yang memiliki kekuatan.

Diversifikasi isu sekuritisasi juga menjadi diskursus yang hangat diperbincangkan. Dampak dari globalisasi dimana para aktor hubungan internasional memberikan sebagian dari kedaulatannya kepada entitas lain. Sebuah masalah menjadi tersekuritisasi saat pemimpin mulai membicarakan mengenai masalah tersebut dan mendapatkan atensi dari publik dan negara, terkait ancaman yang ditujukan pada objek yang bernilai. Maka negara memulai tindakan darurat untuk mengatasi ancaman tersebut. Hal yang penting di sini

adalah apakah aktor yang melakukan sekuritisasi bisa sukses mendapatkan dukungan atas permintaannya dalam eksekusi tindakan darurat. Ekonomi adalah salah satu isu yang dewasa ini marak disekuritisasi. Kondisi yang membangun ancaman ekonomi tergantung pada objek yang disekuritisasi. (Buzan and Waever, 2003).

Tren terbaru regionalisme adalah proses kompleks perubahan yang terjadi sebagai akibat dari interaksi tingkatan global, regional, nasional, dan lokal, dan di waktu yang sama melibatkan aktor-aktor negara, non-negara, pasar, dan masyarakat (Schulz, Söderbaum, and Öjendal, 2001). Studi kawasan kembali digemari untuk ditelisik karena karakter khas dinamika di dalamnya, maupun bagaimana kepentingan antar kawasan dan kawasan dengan global semakin bersinggungan. Terutama urusan keamanan dalam kondisi interdependensi dunia yang sangat intens, perilaku dan proses pengambilan keputusan aktor internasional lebih dicermati oleh para ahli. Morgan (1997) menyebutkan bahwa konseptualisasi kepentingan dan keamanan negara lebih berkarakter regional. Sehingga terdapat urgensi untuk merumuskan teori yang mampu menjelaskan korelasi dan implikasi dari latar belakang sejarah, proksimitas geografi, dan pengaruh eksternal terhadap aspek keamanan. Negara tidak mampu membuat dirinya aman tanpa mengejar kebijakan nasionalis (yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman) dan kebijakan internasionalis (yang mengurangi tingkatan ancaman yang diterima dari sistem internasional). Keamanan mengharuskan tindakan pada kedua tingkatan, nasional dan

internasional, dan hanya bisa diperoleh melalui keseimbangan kompleks keduanya (Buzan, 1984).

Buzan and Waever (2003) menjelaskan bahwa Teori Kompleks Keamanan Kawasan menggunakan perspektif materialisme, dibuktikan dengan mempercayai ide teritorialitas yang terbatas dan *distribution of power*. Sebuah negara memiliki rasa kepemilikan dan keterikatan dengan teritori dimana ia terletak, sehingga akan dilakukan segala cara untuk melindungi kedaulatannya dan memastikan keamanannya. Kebanyakan ancaman politik dan militer lebih mudah tersebar pada jarak yang pendek daripada jarak jauh, akibatnya *insecurity* sering diasosiasikan dengan proksimitas. Sebagian besar negara di dunia kian takut dengan tetangganya daripada kekuatan yang jauh jaraknya, sehingga interdependensi keamanan lintas sistem internasional secara penuh tidak akan sama (Buzan, Waever, and De Wilde, 1998). Biasanya dalam studi keamanan fokus utamanya adalah keamanan negara, masyarakatnya, dan nilai dasarnya dari kerusakan fisik dan tekanan militer yang disebabkan oleh pihak eksternal. Pengutamaan keamanan fisik (melalui ancaman dan penggunaan kekuatan) menjadikan tingkatan *insecurity* sebagai indeks sederhana kondisi sistem atau subsistem internasional atau sebagai ukuran perubahannya seiring waktu (Morgan, 1998). Kompleks keamanan adalah kawasan seperti yang didefinisikan melalui lensa keamanan, bukan tergantung atau dimulai dari konseptualisasi lain kekawasan (Buzan and Waever, 2003).

Teori ini juga berfokus pada proses-proses politik dimana isu keamanan terkonstruksi menggunakan perspektif konstruktivisme. Kompleks Keamanan

Kawasan terkonstruksi secara sosial dalam artian bahwa kawasan-kawasan ini satu kesatuan dengan praktek keamanan para aktornya. Keamanan adalah hasil dari perilaku aktor dan praktek-praktek ini menjadi tugas peneliti untuk menerangkannya (Buzan and Waever, 2003). Kawasan adalah objek analisis tersendiri, penjelasan dampak dan sumber dapat ditemukan di lokasi tertentu (Buzan, Waever, and De Wilde, 1998). Urusan keamanan terkonstruksi dalam kawasan dan penyebab maupun implikasi dari hal tersebut pastinya dipengaruhi oleh proses-proses politik. Karena urusan keamanan meliputi faktor-faktor objektif dan subjektif, hal tersebut lebih mengeksplor sifat hubungan antar negara daripada percobaan kaku untuk membandingkan ciri-ciri karakteristik analisis kekuatan (Buzan, 1983). Osgood (1979) menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan keamanan secara inheren subjektif dan melampaui elemen material seperti perbatasan dan sumber daya. Karakter diri bangsa yang sangat luas dan tidak berwujud (*intangible*) adalah subjek keamanan.

Buzan dan Waever (2003) mendeskripsikan Teori Kompleks Keamanan Kawasan berguna untuk tiga alasan sebagai berikut: (1) Teori tersebut mampu menjelaskan tingkatan analisis yang tepat dalam studi keamanan, (2) Teori tersebut mampu digunakan dalam penelitian empiris, (3) Membentuk skenario berbasis teori melalui kemungkinan bentuk-bentuk dan alternatif Kompleks Keamanan Kawasan. Teori ini menawarkan kemungkinan untuk menghubungkan secara sistematis studi kondisi internal, hubungan antar unit dalam kawasan, hubungan antar kawasan, dan dinamika saling mempengaruhi

antara kawasan dengan kekuatan global. Struktur penting sebuah Kompleks Keamanan Kawasan terwujud dalam empat variabel:

1. Perbatasan, yang membedakan kompleks dengan tetangganya
2. Struktur Anarki, yang berarti kompleks harus terdiri dari dua atau lebih unit otonom
3. Polaritas, yang menjelaskan *distribution of power* antara unit-unit
4. Konstruksi Sosial, yang menjelaskan pola *amity and enmity* antara unit-unit

Terdapat tiga komponen kunci dalam struktur Kompleks Keamanan (Buzan, 2000), yaitu:

1. Susunan unit-unit dan diferensiasi antar unit
2. Pola *amity and enmity*
3. *Distribution of power* antara unit utama

Sebelumnya, Buzan (1986) mengklasifikasikan Kompleks Keamanan ke dalam dua level, yaitu *Lower* dan *Higher*, dengan penjelasan sebagai berikut:

- *Lower Level* - terdiri dari negara-negara lokal yang kekuatannya tidak melampaui banyak, atau sama sekali, lebih dari jangkauan tetangga langsungnya.
- *Higher Level* - meliputi adidaya yang kekuatannya mungkin untuk meluas melampaui lingkungan sekitarnya, atau pada kasus seperti Tiongkok dan Rusia (sebelumnya Uni Soviet) memiliki pengaruh luas sesuai dengan ukuran fisiknya yang membentang lintas kawasan.

**Tabel 2. 1 Tipe dan Contoh Kompleks Keamanan Kawasan**

| Tipe                      | Fitur Kunci  | Contoh   |
|---------------------------|--|--|
| <i>Standard</i>           | Polaritas ditentukan oleh kekuatan kawasan   | Timur Tengah, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Tanduk Afrika, Afrika bagian Selatan |
| <i>Centred Superpower</i> | Unipolar terpusat pada satu adidaya  | Amerika Timur  |
| <i>Great power</i>        | Unipolar terpusat pada satu kekuatan besar   | PNM, kemungkinan Asia Selatan  |
| [ <i>Regional Power</i> ] | Unipolar terpusat pada satu kekuatan kawasan   | Tidak ada  |
| <i>Institutional</i>      | Kawasan memperoleh kualitas aktor melalui institusi  | Uni Eropa  |
| <i>Great Power</i>        | Bi- atau multipolar dengan kekuatan besar sebagai pusat kekuatan kawasan   | Eropa pra-1945, Asia Timur   |
| <i>Supercomplexes</i>     | Tingkatan inter-kawasan yang kuat disebabkan oleh timbulnya dinamika keamanan dari <i>spillover</i> kekuatan besar ke kawasan terdekat | Asia Timur dan Asia Selatan  |

Sumber: diolah dari Barry Buzan dan Ole Waever (2003)

Dalam literatur selanjutnya, Buzan dan Waever (2003) melengkapi Tipe Kompleks Keamanan menjadi tiga untuk menjelaskan lebih lanjut terkait polaritas dan karakteristik masing-masing sebagai berikut:

- *Standard* - polaritas didefinisikan sepenuhnya oleh kekuatan kawasan dan unipolaritas berarti kawasan hanya memuat satu kekuatan kawasan.
- *Center* - terdapat tiga bentuk umumnya, yang pertama dan kedua adalah kompleksnya berbentuk unipolar tetapi kekuatan terkait adalah kekuatan besar atau adidaya. Ketiga, kompleks meliputi kawasan yang terintegrasi melalui institusi.
- *Great Power* - polaritas kawasan didefinisikan oleh lebih dari satu kekuatan tingkatan global yang termasuk di dalamnya.

Kompleks *Great Power* harus dianggap berbeda dari kompleks biasanya karena dua alasan, dinamikanya mampu berdampak langsung dalam perhitungan pengimbangan atau *balancing* di tingkatan global dan kemungkinan luasnya dampak limpahan atau *spillover* ke kawasan sekitar. Saat dua atau lebih adidaya berada di dalam satu Kompleks Keamanan Kawasan, maka dinamika internal, antara *amity* atau *enmity*, akan menjadi faktor signifikan dalam dinamika keamanan tingkat global.

Buzan (2005) mendeskripsikan struktur kekuatan global saat ini terdiri atas adidaya dan kekuatan besar, adidaya direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan kekuatan besar mencakup RRT; Uni Eropa; Jepang; dan Rusia atau disebut sebagai sistem 1 + 4. Adidaya diartikan sebagai negara-negara yang eksistensi dan pengaruhnya jauh melebihi logika geografi dan kedekatan dalam hubungan keamanan. Kesamaan model *distribution of power* antara para kekuatan dunia ke dalam dinamika kompleks kawasan adalah mekanisme penetrasi, yang terjadi saat kekuatan eksternal melakukan penyesuaian keamanan dengan negara di dalam kompleks. Untuk para kekuatan global, tingkatan kawasan penting untuk membentuk pilihan dan akibat dari proyeksi pengaruh dan rivalitas ke dalam sistem (Buzan and Waever, 2003).

Negara 'luar' memiliki kekuatan militer terbesar yang tersebar dalam kawasan selama bertahun-tahun, adalah pihak yang penting dalam aliansi, ia berpartisipasi dalam hampir seluruh negosiasi penting mengenai konflik dan keamanan di sana, bertarung dalam perang di sana. Menimbang seluruh intensi dan tujuan, dalam konteks keamanan dan konflik, negara 'luar' terdapat di

‘dalam’ sistem. Para peserta kompleks lebih seksama memperhatikan hubungan dan interaksi keamanan mereka dengan beberapa atau seluruh anggota lainnya di dalam area geografis tersebut daripada negara-negara yang tidak berikutserta dalam interaksi tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa Amerika Serikat dihitung sebagai peserta dari Kompleks Keamanan Kawasan Asia Timur, bukan Asia Selatan (Morgan, 1997).

Menurut Buzan dan Waever (2003), Kompleks Keamanan Kawasan adalah pola yang tahan lama, daripada permanen. Struktur dan karakter utama Kompleks Keamanan Kawasan bisa didefinisikan dengan dua macam hubungan, yaitu hubungan kekuasaan atau *power relations* dan pola *amity and enmity*. Dendam dan persahabatan historis, maupun permasalahan spesifik yang memicu konflik atau kerjasama, ikut serta dalam pembentukan konstelasi keseluruhan ketakutan, ancaman, dan pertemanan yang mendefinisikan Kompleks Keamanan Kawasan. Dinamika dan struktur dari sebuah kompleks keamanan dihasilkan oleh negara-negara di dalam kompleks dengan persepsi dan interaksi keamanan satu sama lain (Buzan, Waever, and De Wilde, 1998).

## **B. Teori Pengambilan Keputusan**

Kebijakan Luar Negeri (KLN) adalah strategi atau pendekatan yang dipilih oleh pemerintah nasional untuk mencapai tujuannya dalam hubungannya dengan entitas eksternal, hal ini termasuk keputusan untuk tidak melakukan apapun (Hudson, 2016). Menurut Neack (2008), Studi KLN berada dalam ranah Ilmu Politik yang dikenal sebagai Politik Internasional. Bidang KLN, tidak seperti kebijakan publik, tidak bisa didefinisikan oleh pertanyaan, objektif, target

atau fungsi tunggal. KLN bisa didefinisikan oleh kriteria geografi: setiap tindakan (maupun tidak bertindak) yang dilakukan oleh otoritas politik berdaulat dalam konteks di luar perbatasan negara bisa dihitung sebagai komponen dari KLN, tanpa memedulikan ranah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri atau otoritas publik lainnya (Morin & Paquin, 2018). Walaupun kita sadar bahwa sejumlah faktor domestik dan internasional memang mempengaruhi tindakan KLN, pengaruh tersebut harus disalurkan melalui struktur politik dari pemerintahan yang mengidentifikasi, menentukan, dan mengimplementasi KLN (Hermann & Hermann, 1989). Pengaturan Aspek Dual atau *dual-aspect setting* adalah sebuah istilah permainan yang harus dijalankan oleh para pengambil keputusan di waktu yang sama antara politik domestik dan internasional (Putnam, 1988, cited in Hudson, 2002). Posisi kekuatan sebuah negara menentukan kekuatannya untuk menjalankan KLN. Kekuatan nasional berarti kapasitas untuk membujuk atau memaksa. Bentuk utamanya adalah militer, ekonomi, politik, dan ideologi (Snyder, 1952).

Snyder, Bruck, dan Sapin (2002) menjabarkan bahwa politik internasional kebanyakan berfokus dalam tindakan, reaksi, dan interaksi antara entitas politik yang disebut negara. Tindakan hadir saat komponen berikut dipastikan ada: aktor, tujuan, alat, dan situasi. Untuk menjelaskan tindakan maka perlu dipahami bahwa proses merupakan bagian dari waktu dan perubahan yang berkelanjutan dalam hubungan – termasuk penyebab dan akibatnya. Tindakan muncul dari keperluan untuk membangun, mempertahankan, dan meregulasi hubungan antar negara yang memuaskan dan untuk menggunakan kekuasaan

dalam menyelesaikan hubungan yang tidak diinginkan. Formulasi tindakan-reaksi-interaksi menjelaskan bahwa rangkaian tindakan dan interaksi akan selalu tertutup atau simetris. Terdapat asumsi bahwa antar negara pastinya terjadi hubungan resiprokal, yang digambarkan: Negara A  $\leftrightarrow$  Negara B. Namun asumsi ini tidak selalu terjadi, ada kemungkinan juga bentuk asimetris dimana Negara A bertindak dan Negara B bereaksi tapi tidak ada tindakan lanjutan langsung A terhadap reaksi B, yang digambarkan: Negara A  $\rightarrow$  Negara B  $\rightarrow$ . Saat lebih dari dua negara terlibat, kemungkinan rangkaian formulasi akan meningkat juga. Tindakan dan interaksi dari negara memiliki sejumlah bentuk – deklarasi, perjanjian formal, regulasi hubungan, diskusi, hibah atau pinjaman, konflik bersenjata, dsb.

Analisis Kebijakan Luar Negeri (AKLN) adalah sub-bidang Ilmu Hubungan Internasional yang menjelaskan KLN atau perilaku KLN, berdasarkan pendekatan teoritis individu pengambil keputusan yang bekerja sendiri maupun dalam kelompok (Hudson, 2016). AKLN berfokus pada interaksi kontinu antara aktor dan lingkungannya, sehingga penting untuk mempertimbangkan konteks internasional agar memahami KLN lebih baik. AKLN biasanya mengintegrasikan disiplin ilmu yang berbeda dan ciri khas interdisipliner ini membuat keragaman dalam model teoritis dan pendekatan metodologi (Morin & Paquin, 2018). Kekuatan AKLN adalah pendekatan integratif yang menekankan pada individu, grup, dan institusi atau di dalam level negara sebagai tenaga penggerak perilaku dan hasil KLN (Drury et al., 2010, cited in Morin & Paquin, 2018, p. 7). Melalui AKLN dampak dari perbedaan

aktor dalam proses pembuatan kebijakan akan diobservasi (Piana, 2004, cited in Al-Najjar and Husien, 2022).

Permulaan perkembangan Analisis Kebijakan Luar Negeri (AKLN) biasanya diasosiasikan dengan publikasi pertama Snyder, Bruck, dan Sapin pada tahun 1956. Pendekatan ini mencoba untuk memahami kebijakan luar negeri dengan memperlakukan negara sebagai anggota dari kumpulan fenomena dan berusaha untuk menciptakan acuan tentang penyebab dan sifat dari perilaku mereka, berfokus pada proses pengambilan keputusan dalam sejumlah aspeknya untuk membuat penjelasan (Smith, 1986). Pengambilan keputusan atau *decision-making* adalah proses yang menghasilkan pemilihan dari sejumlah proyek alternatif yang problematis dan terdefinisi secara sosial dari sebuah proyek yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan masa depan tertentu yang digambarkan oleh para pengambil keputusan (Snyder, Bruck, and Sapin, 2002).

Dalam *Politics among Nations*, realis tidak menjelaskan pengaruh dari faktor domestik terhadap KLN, urusan domestik yang dibahas ialah terkait sumber daya dari kekuatan nasional dan peranan ideologi. Selain itu, realis setuju bahwa KLN memiliki bentuk yang beragam namun percaya sifat alamiah manusia tidak bervariasi. Sehingga belum terbentuk penjelasan mengapa beberapa negara bertingkah berbeda dibanding yang lain, seperti adanya sejumlah negara yang ekspansionis namun ada juga yang tidak (Smith, 1986). Snyder, Bruck, dan Sapin menolak pendapat para realis yang berpendapat bahwa pemimpin negara, tanpa memandang perbedaan individual, akan membuat pilihan KLN yang sama berdasarkan kepentingan nasional. Alih-alih mereka

menyebutkan bahwa pilihan KLN berasal dari sumber yang beragam, termasuk biografi dari para pengambil keputusan dan kerangka organisasi dimana keputusan dibuat (Neack, 2008).

Al-Najjar & Husien (2022) menjelaskan Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri (PKKLN) sebagai keputusan yang diambil oleh individu, grup, dan koalisi yang mempengaruhi perilaku negara pada forum internasional. Lovell (1970) berpendapat bahwa Keputusan KLN terbentuk sebagai respon dari peristiwa dan masalah yang telah terjadi atau yang diantisipasi secara global. PKKLN tidak hanya mencakup pilihan di antara rangkaian alternatif, tetapi juga termasuk komitmen sumber daya untuk waktu yang telah ditentukan, di dalamnya termasuk pernyataan dan komunikasi yang diperlukan untuk mengatur koordinasi dalam implementasi kebijakan.

Politik internasional banyak berfokus pada *bagaimana* pilihan dibuat, tetapi melewati kondisi-kondisi *apa* yang membuat pilihan dibuat. Terdapat tiga cara untuk melihat unit keputusan: (1) Ada Sistem Aktual untuk Pemenuhan Objektif yang Jelas; (2) Ada Unit Biasa untuk Pemenuhan Objektif yang Umum; dan (3) Setiap Unit secara Umum. Unit adalah alat analisis – panduan untuk para peneliti merekonstruksi proses pengambilan keputusan dan bagaimana batasan-batasannya dibangun. Faktor-faktor yang mungkin membatasi bagaimana para pengambil keputusan berdeliberasi dan hasil dari deliberasinya adalah batasan (Snyder, Bruck, and Sapin, 2002). Hal ini juga sejalan dengan konstitusi atau struktur politik negara tersebut. Snyder, Bruck, dan Sapin bertujuan untuk menyediakan kategorisasi pengumpulan data yang dasar dan serupa agar

membuat riset KLN bisa dilakukan. Fokus utamanya adalah para pengambil keputusan, perspektif mereka, dan bagaimana mereka merumuskan pekerjaan mereka (Al-Najjar & Husien, 2022).

Dalam Teori Pengambilan Keputusan, Snyder, Bruck, dan Sapin menawarkan tiga Penentu Dasar Perilaku Negara atau *Basic Determinants of State Action* (Snyder, Bruck, and Sapin, 2002), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Kompetensi (*Spheres of Competence*)

Kompetensi adalah totalitas yang relevan dan diperlukan dalam aktivitas yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk pemenuhan objektif organisasi. Untuk menjalankan aktivitas terdapat seperangkat aturan yang memandu perilaku aktor. Aturan terbagi menjadi yang ditetapkan (*prescribed*), berarti peraturan tertulis dalam spesifikasi pekerjaan dan konvensional (*conventional*), berarti peraturan yang telah diterima selazimnya. Kedua pola aturan ini disebut sebagai Karakteristik Formal Organisasi atau *the formal characteristics of organization*. Kompetensi aktor juga tidak bisa dipisahkan dari lingkungan dimana ia termasuk, yaitu birokrasi. Birokratisasi adalah proses dimana peraturan, pendahulu, dan metode operasi berorientasi secara tradisional sehingga sudah tidak mudah terjadi penentangan, mempersoalkan, atau amandemen. Dari seluruh faktor ini perlu diperhatikan bahwa walaupun perilaku aktor dipengaruhi oleh lingkungannya, ia juga menginterpretasi peraturan dan harus diperlakukan lebih dari agen pasif.

2. Komunikasi dan Informasi (*Communication and Information*)

Terdapat karakter spesifik aktivitas komunikatif aktor, yaitu: informasi yang dikomunikasikan; arti yang melekat pada informasi; kanal yang terpilih atau tidak terpilih akan bergantung pada interpretasi aturan kompetensinya, yang nantinya akan membentuk posisi struktural aktor, biografi, dan penggunaan informasi yang tersedia untuk dirinya. Aktor pastinya memiliki aktivitas berbagi pengalaman atau *shared experience* dengan sistem organisasinya. Peneliti sebaiknya menelisik aktor bersama siapa berbagi pengalaman, dengan kelompok apa aktor mengidentifikasi dirinya, dan konsekuensinya untuk orientasi aktor. Ditetapkan juga konsep Net Komunikasi atau *communication net* yang menggambarkan arus informasi di dalam sistem. Terdapat tiga macam informasi dalam net, yaitu informasi yang penting untuk mencapai tujuan dari sistem, informasi terkait keadaan internal sistem, dan informasi mengenai keadaan hubungan sistem dengan situasi di sekitarnya. Umpan balik atau *feedback* merupakan pesan terkait perilaku atau keadaan sistem yang dikembalikan ke sistem. Hal tersebut adalah komponen dalam arus kontinu informasi, juga menjadi gambaran evaluasi tindakan untuk aktor.

### 3. Motivasi (*Motivation*)

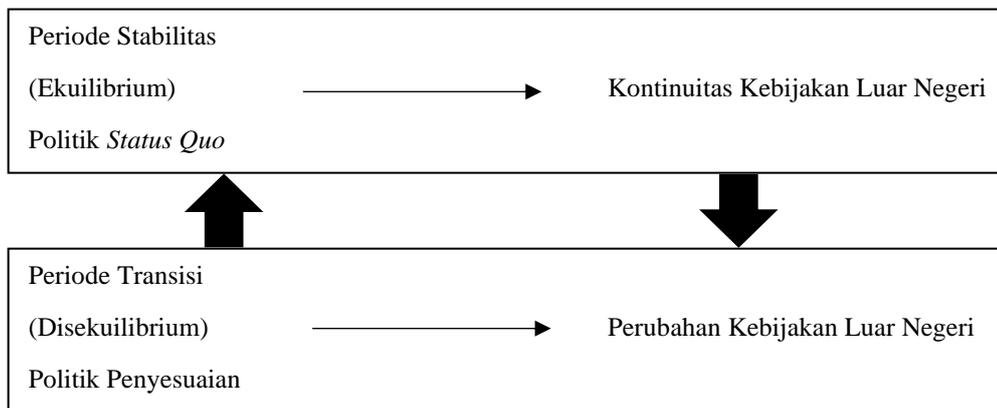
Mustahil untuk mengetahui alasan di balik perilaku negara tanpa mengetahui juga tentang motivasi dari para pengambil keputusan. Dalam penentu ini, tidak akan dijelaskan *semua* motif dari *semua* peserta di bawah *semua* situasi dalam proses pengambilan keputusan. Fokusnya adalah pada faktor motivasional yang akan membantu penjelasan perilaku aktor dalam

sistem tertentu dalam aktivitas. Motif dan bentuk ekspresinya bisa berubah dari waktu ke waktu dan tidak semua motif bisa dipenuhi secara sama dan pada waktu yang sama dikarenakan terbatasnya sumber daya dan batasan unit pengambilan keputusan. Motif bukanlah perilaku namun kesimpulan yang ditarik dari perilaku. Secara umum terdapat dua macam motif, yaitu Motif 'Untuk' atau *in order to* merupakan tujuan akhir negara yang digambarkan oleh aktor dan Motif 'Karena' atau *because of* merupakan pengalaman lampau aktor. Sikap atau *attitude* adalah kesiapan pengambil keputusan untuk termotivasi oleh pemicu tertentu.

Relasi dari ketiga penentu ini bisa menjadi dasar empiris untuk penjelasan dari sebuah keputusan. Dimana terdapat pengambilan keputusan organisasi kompleks, ketiga kondisi tersebut harus ada dan terkait dampaknya dalam pengambilan keputusan. Jalan paling efektif untuk menarik kesimpulan adalah dengan mengkategorikan data, penentu mana yang paling mendominasi dalam proses (Snyder & Paige, 1958).

Kontribusi terpenting kerangka yang dibuat oleh Snyder, Bruck, dan Sapin kepada teori Hubungan Internasional adalah diidentifikasinya tokoh pengambil keputusan atau *human decision-maker* sebagai titik pertemuan teoritis antara penentu utama tingkah laku negara, yaitu faktor material dan ideasional. Model ini interdisipliner dikarenakan kebutuhan untuk memuat pengumpulan informasi yang luas, seperti mengenai individu dalam peran pengambil keputusan, konteks organisasi dimana keputusan dibuat, jejaring komunikasi, pengaturan budaya dan ideasional, urutan waktu keputusan dibuat

dan dimodifikasi sesuai dengan umpan balik yang diterima, dan dinamika pembangunan ulang antara faktor-faktor tersebut (Hudson, 2002).



**Bagan 2. 1 Siklus Perubahan Kebijakan Luar Negeri**

Sumber: diolah dari Jerrel A. Rosati, Joe D. Hagan, dan Martin W. Sampson III (1994, hal. 227)

KLN adalah sejumlah pilihan yang dibuat untuk memenuhi kepentingan nasional pada lingkup internasional, sehingga terdapat kemungkinan akan perubahan kebijakan saat terdapat faktor-faktor tertentu yang memicu. Rosati merumuskan bahwa perubahan KLN silih berganti antara ‘stabilitas’ dan ‘transisi’. Argumen dasar mereka adalah ‘periode stabil’ yang panjang biasanya dari waktu ke waktu diinterupsi sejenak oleh ‘periode transisi’. Kesimpulan ini diambil dari observasi atas kebijakan yang relatif statis setelah diberlakukan, sedangkan kondisi lingkungan masalah yang akan diselesaikan oleh kebijakan tersebut lebih dinamis dan selalu melewati proses transformasi secara konstan (Gustavsson, 1999). Kebijakan terbentuk atas proses yang berkesinambungan antara negara, masyarakat, dan lingkungan. Maka dalam implementasinya,

kondisi di sekitar kebijakan dan pembuat kebijakan mempengaruhi perubahan KLN. Intensitas penolakan atau penerimaan kebijakan di kalangan masyarakat, birokrasi, maupun komunitas internasional bisa mengubah potensi perubahan KLN (Rosati, Hagan, and Simpson, 1994).

Rosati menyebutkan bahwa sejumlah batasan pada level internasional meningkatkan tendensi kontinuitas KLN. Contohnya seperti perjanjian lampau, komitmen, dan hubungan komersil meneguhkan daya tahan pemerintah untuk tidak berubah. Lagi pula, KLN terbatas oleh rezim, hukum, dan norma internasional, membebaskan standar, dan ekspektasi dari perilaku negara yang diterima (Haesebrouck and Joly, 2021). Dengan ini, Rosati, Hagan, dan Simpson merumuskan bahwa KLN mungkin mengalami pola siklus dalam berubah secara tidak permanen dikarenakan sifat inersianya untuk bertahan dan berkelanjutan.